

## Inovasi - Inovasi Di Kabupaten Purbalingga

R.Permadi Mulajaya

[mul\\_ajaya@yahoo.co.id](mailto:mul_ajaya@yahoo.co.id)

Charis Christiani

[charis\\_18@rocketmail.com](mailto:charis_18@rocketmail.com)

### Abstract

*In the era of regional autonomy, local governments are required to be independent and can overcome some of the problems faced by the region, including issues in improving public services for the welfare of the community. Therefore, local governments are required to have innovations in the management of government. Innovation itself serves to encourage organizational growth, improve future success, and is the engine that allows organizations to survive vulnerabilities. In innovation there are several principles that must be implemented: efficiency improvement, effectiveness improvement, service quality improvement, no conflict of interest, public interest oriented, done openly, fulfilling the values of propriety, and accountable the results are not for self-interest own.*

*Purbalingga District Government, Central Java Province is one of the areas that have innovation in government management and ranked number 2 in the top 99 innovation of Indonesian public service in 201 (Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform Republic of Indonesia (MenPAN-RB) Number 5 Year 2016 About TOP Setting 99 Public Service Innovation 2016). Innovation that has been done is 1. innovation in the field of Public service that is award, this program brings Purbalingga District into second rank Nomination TOP 99 on scholarship program SMK 3 purbalingga with solar program for the papa. Pemerin Public Service Innovation Competition (SiNovik) 2016. 2. Innovation in transportation namely Purbalingga and PT Angkasa Pura (AP) II will sign a Memorandum of Understanding (MoU) related to the construction of General Soedirman Airport on Thursday (14/9/2017). The MoU which will be the basis of the implementation the construction of the Great Soedirman Air Force became a commercial airport, from the previous as the Air Force base. 3. Innovation in the field of improving the economy is to overcome the problems of poverty and unemployment by way of training-training (training to make wigs, sewing training, exhaust tailoring and make false eyelashes), 4. Innovation in the field of Innovation Innovation Local Government of Purbalingga Regency agro development is done in Serang Village, Karangreja Subdistrict, Purbalingga District through the development of BUMDes. BUMDes are named "SERANG MAKMUR SEJAHTERA". The objective of the efforts undertaken by BUMDes is to develop the effort to reduce poverty and unemployment, improve the ability to utilize the existing resources in Serang village, and improve the fungsi of economic institutions in the tourism sector*

*Keywords: Innovation, Service, Public, Agro Tourism, Government, Region*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Saat ini dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat bisa mandiri dan bisa mengatasi beberapa persoalan yang dihadapi daerah tersebut, termasuk persoalan dalam meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inovasi-inovasi dalam pengelolaan

pemerintahnya. Menurut Peter Drucker (1996) bahwa setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (core competence), yaitu inovasi. Inovasi itu sendiri berfungsi untuk mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan keberhasilan masa yang akan datang, dan merupakan mesin yang memungkinkan organisasi bertahan dari kerentanan (viability). Inovasi juga adalah tindakan yang memberi sumber daya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan

kesejahteraan (Hutoaruk, n.d.) Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 386 sampai pasal 387 menggambarkan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melakukan inovasi ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yakni : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan hasil pra survey dari beberapa referensi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki inovasi dalam pengelolaan pemerintahannya dan masuk dalam peringkat nomor 2 dalam top 99 inovasi pelayanan publik Indonesia tahun 2016. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 (<https://bupati.purbalinggakab.go.id/purbalingga-2-peringkat-dua-nominasi-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016/> diunduh pada tanggal 8 September 2017). Selain itu, Kabupaten Purbalingga juga pada tahun 2017 masuk sebagai mitra Lembaga Administrasi Negara dari 12 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan, dan saat ini tengah menyiapkan 167 inovasi yang telah dijalankan, seperti percepatan pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan lain-lain

(<https://m.otonomi.co.id> diunduh pada tanggal 8 September 2017).

## 2. Permasalahan

Bagaimana gambaran tentang proses strategi dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya

## 3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang proses strategi dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

## B. Pembahasan Masalah

### a. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

#### 1. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Kondisi Topografi

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi : 101011'-109035' Bujur Timur dan 7010'- 7029' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah (**Gambar 1**)

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Pekalongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Selanjutnya, wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah

sekitar 77.764,122 ha atau sekitar 2.39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha).

Dari 18 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.159 ha. Urutan kedua Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 ha, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangmoncol yaitu 6.027 ha. Tiga Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah dengan luas masing-masing 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut :

- Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit–bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai factor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

## **2. Pemerintahan**

### **2.1 Pembagian Wilayah Administrasi**

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 terbagi menjadi 239 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Dari 239 desa/kelurahan, 224 merupakan desa sedang 15 merupakan kelurahan. Pada tahun 2015 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Balai Desa maupun Kantor Desa. Jumlah

rukun tetangga (RT) sebanyak 5.069 RT dan rukun warga (RW) sebanyak 1.546 RW.

### **2.2 Kepegawaian**

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 tercatat sebanyak 9.016 orang terdiri dari 4,707 orang laki-laki dan 4,309 orang perempuan. Dengan rincian menurut golongan adalah sebagai berikut: golongan I (satu) sebanyak 190 orang, golongan II (dua) sebanyak 1.708 orang, golongan III (tiga) sebanyak 3.845 orang dan golongan IV (empat) sebanyak 3.019 orang. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 254 orang.

### **3. Kependudukan**

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi penduduk tahun 2015 berjumlah 903.181 yang terdiri dari 446.258 laki–laki dan 456.923 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 0,98. Banyaknya rumah tangga mencapai 225.116 atau rata–rata anggota per rumah tangga 4,01 orang.

#### **2.2.2. Kepegawaian**

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 tercatat sebanyak 9.016 orang terdiri dari 4,707 orang laki-laki dan 4,309 orang perempuan. Dengan rincian menurut golongan adalah sebagai berikut: golongan I (satu) sebanyak 190 orang, golongan II (dua) sebanyak 1.708 orang, golongan III (tiga) sebanyak 3.845 orang dan golongan IV (empat) sebanyak 3.019 orang. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 254 orang.

#### **2.3. Kependudukan**

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi penduduk tahun 2015 berjumlah 903.181 yang terdiri dari 446.258 laki-laki dan 456.923 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 0,98. Banyaknya rumah tangga mencapai 225.116 atau rata-rata anggota per rumah tangga 4,01 orang. Tabel 1

Selanjutnya berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0–14 tahun sebanyak 234.070 dan 15 tahun keatas sebanyak 669.111, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dari hasil proyeksi penduduk 1,02 persen sehingga kepadatan penduduk adalah 1.363 orang per km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 4.008 orang per km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Karangjambu yang hanya 676 orang per km<sup>2</sup>.

Sedangkan berdasarkan hasil Sakernas tahun 2015 penduduk Usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 451.955, sementara itu, yang bukan angkatan kerja sebanyak 212.237. Penduduk yang bekerja sebanyak 430.097 terdiri dari 252.978 laki-laki dan 177.119 perempuan.

#### 4. Sosial

##### 4.1. Pendidikan

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan bahwa dari catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga terdapat sekolah TK sebanyak 513 sekolah dengan guru 5.868 orang, murid 17.483 siswa; SD sebanyak 646 sekolah dengan guru 4.870 orang, murid 99.937 siswa; SLTP sebanyak 117 sekolah dengan guru 2.452 orang, murid 44.022 siswa; SLTA Umum sebanyak 25 sekolah dengan guru 729 orang, murid 10.207 siswa dan SLTA Kejuruan sebanyak 31 sekolah dengan guru 1.032 orang, murid 18.390 siswa. Grafik 1

Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

#### 5. Kesehatan dan Kemiskinan

Berdasarkan Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga terdapat rumah sakit 4 buah, rumah bersalin 1 buah, puskesmas 22 buah, pukesmas pembantu 48 buah, puskesmas keliling 22 buah dan apotik 72 buah. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dokter 194 orang, bidan 338 orang dan paramedis lainnya 1.262 orang. Selanjutnya jika dilihat dari angka kemiskinan, Kabupaten Purbalingga memiliki trend persentase kemiskinan yang menurut tiap tahunnya. Pada tahun 2010 sekitar 24.58 persen dan pada tahun 2014 sekitar 19.75 persen menurun sekitar 5 persen dalam jangka waktu 4 tahun. Tabel 2.

#### 6. Visi Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Purbalingga

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.**

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. .

3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat .
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

**b. Inovasi - Inovasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

**1. Inovasi Pelayanan Publik**

Dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang Baik,

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat sedang berupaya untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka menciptakan berbagai pelayanan publik dan untuk menggunakan setiap potensi yang ada secara efisien Dengan Motto, kerja Cerdas, kerja keras, kerja Ikhlas. Lima agenda besar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga ;

1. Intelektual ; Pemahaman aparatur akan tupoksi didukung dengan perbaikan peraturan
2. daerah, perdes.
3. Struktural ; Melantik pejabat pemerintah yang berkompeten dan bersinergi dengan bupati dalam menjalankan program unggulan purbalingga, disertai pembentukan perilaku yang konsisten.
4. Manajerial ; Kemampuan manajemen dan kepemimpinan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
5. Behavior Melatih kedisiplinan apatur pemerintah dengan melaksanakan apel pagi secara bergiliran disetiap SKPD untuk mewujudkan kedisiplinan dan perubahan perilaku PNS.
6. Membuat kebijakan strategis ; mengurangi ketimpangan antar wilayah, menekan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan

Selanjutnya ada lima Agenda besar tersebut disuport dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada publik. Perubahan signifikan dilakukan dengan rasio penentuan berubah dari 70 % anggaran untuk kebutuhan aparatur dan 30% anggaran publik, kemudian bisa

diubah 30% untuk kebutuhan publik dan 70% untuk anggaran publik.

Inovasi yang dilakukan dipurbalingga yang menjadikan kabupaten ini mendapatkan penghargaan antara lain adalah sebagai berikut :

Ditetapkan menjadi ranking dua Nominasi TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016. penghargaan pada program beasiswa SMK 3 purbalingga dengan program matahari untuk kaum papa.Pemerintah.

Kabupaten Purbalingga ditetapkan menjadi ranking dua Nominasi TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Setda Purbalingga Widiyono menuturkan, kompetisi SiNovik ini diselenggarakan tiap tahun oleh KemenPAN-RB. Kabupaten Purbalingga baru kali pertama masuk nominasi TOP 99 dengan usulan proposal berjudul “Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga” yang mengangkat salah satu terobosan inovasi pelayanan publik di SMK Negeri 3 Purbalingga. Gambar 2

Keunggulan kabupaten Purbalingga dalam inovasi pendirian SMK Negeri 3 Purbalingga yang sebelumnya disebut SMK “Duafa” menjadi sekolah yang peduli erhadap

masyarakat miskin. Kepedulian itu diwujudkan dalam sistem perekrutan yang diutamakan bagi siswa berprestasi dari kaum duafa sehingga memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. “Mereka belajar dengan sistem boarding school atau diasramakan dengan fasilitas yang dicukupi, dibimbing pembinaan karakternya dan intelektualnya. Pada 2011, Purbalingga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) Rp 27 miliar atas prestasi 5 tahun berturut-turut dapat menetapkan APBD secara tepat waktu. Momentum inilah yang kemudian menggugah Bupati untuk mewujudkan impian membangun sekolah gratis berasrama. “Pembangunannya dilakukan selama 2 tahun anggaran dengan total anggaran Rp 6,9 miliar yang sumber dananya dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2011 dan 2012.

## **2. Inovasi Transportasi**

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan PT Angkasa Pura (AP) II akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, Kamis (14/9/2017).MoU tersebut yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara komersial, dari sebelumnya sebagai pangkalan TNI AU. Bupati Purbalingga, mengatakan, setelah dilakukan penandatanganan tersebut, PT AP

II sebagai pelaksana proyek akan menyusun Detail Engineering Design (DED). Proses pembangunan akan diawali dengan peletakan batu pertama bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Purbalingga ke 187, tanggal 18 Desember 2017. Bandara tersebut rencananya akan selesai dibangun dan mulai beroperasi tepat satu tahun kedepan, yakni 18 Desember 2018. sehingga keberadaan bandara tersebut akan membawa dampak positif terutama bagi perkembangan sektor ekonomi di wilayah Jateng Barat bagian Selatan.

PT Angkasa Pura II akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 Miliar untuk pembangunan tahap pertama. Sementara itu, DPRD Purbalingga memberikan dukungan penuh atas rencana pembangunan Bandara Jenderal Sudirman. Bentuk dukungan dilakukan dengan menyetujui alokasi anggaran di APBD Perubahan tahun 2017 guna 22 pembebasan lahan untuk kepentingan proyek bandara dan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembebasan lahan. Ada lahan seluas 4,2 hektar milik 60 Kepala Keluarga (KK) yang akan digunakan untuk pembangunan bandara. Proses ganti rugi diharapkan bisa berjalan dan memastikan bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga akan beroperasi paling lambat akhir tahun 2018. Gambar 3

### **3. Inovasi Peningkatan Perekonomian**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah

mencapai 39,2 juta jiwa. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah mencapai 940 ribu jiwa di bulan Februari tahun 2013 dari sebelumnya mencapai 962 ribu jiwa tahun 2012. Jumlah penduduk warga Kecamatan Purbalingga ada 41.245 dari jumlah 14 Kelurahan/Desa. Kelurahan Purbalingga Lor termasuk salah satu Kelurahan di 23

Kecamatan Purbalingga yang memiliki Luas  $\pm$  103,240 Ha dan jumlah penduduk ada 6.915 jiwa. Berdasarkan data dari BPS tahun 2012 dimana jumlah penduduk warga miskin di Kelurahan Purbalingga Lor ada 1.547 jiwa, 732 jiwa masuk dalam golongan pengangguran, dan 542 jiwa pemuda putus sekolah. BPS Kabupaten Purbalingga (2012).

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, sebagai jalan adalah melalui model pelatihan. Kelurahan Purbalingga Lor memiliki potensi wilayah pertanian padi dan petani karet. Kelurahan Purbalingga Lor ini memiliki program pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan membuat rambut palsu, pelatihan menjahit, pelatihan membuat knalpot dan membuat bulu mata palsu. Pelatihan membuat bulu mata palsu bagi pemuda yang putus sekolah yang menganggur merupakan pelatihan yang bisa menyedot banyak perhatian para peminatnya, dan kebanyakan pemuda lebih antusias untuk memilih program pelatihan membuat bulu mata palsu ketimbang panas-panasan di tengah sawah.

Penyelenggaraan pelatihan disuatu lembaga pelatihan adalah proses reformasi atau pengolahan sumber daya manusia dari tenaga kerja produksi rill. Proses menghasilkan output yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelatihan sangat ditentukan oleh berbagai input dan bermacam-macam sumber yang mendukung proses pelatihan itu sendiri

Begitu pentingnya pelatihan membuat bulu mata palsu bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun bekerja diharapkan agar mereka menyiapkan masa depannya dengan keterampilan yang telah mereka dapat. Hal ini yang dapat menimbulkan satu kajian tentang proses pembelajaran membuat bulu mata palsu dalam upaya memperbaiki kehidupan masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang dapat membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik dengan keterampilan yang mereka miliki. Gambar 4

#### **4. Inovasi Argo Wisata**

Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal pengembangan agrowisata dilakukan di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga melalui pengembangan BUMDes. BUMDes tersebut bernama "SERANG MAKMUR SEJAHTERA". Tujuan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes ini adalah dalam rangka menumbuhkembangkan usaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan

kemampuan dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada di Desa Serang, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi di sektor Pariwisata Desa, Pertanian, Pemanfaatan air bersih, Peternakan menjadi jejaring atau Mitra Lembaga Keuangan mikro dalam kemudahan akses permodalan khususnya dan pengembangan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Gambar 5

Selanjutnya jika dilihat dari visi BUMDes "SERANG MAKMUR SEJAHTERA" Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga adalah terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat, dengan cara peningkatan ekonomi kualitas kesejahteraan dan kemandirian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berperikeadilan. Sedangkan misinya adalah :

- Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berorientasi pasar;

- Mengusahakan pemupukan modal dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengembangkan usaha dalam bentuk kelompok maupun perorangan dengan sistem bagi hasil, bantuan modal berupa barang atau uang secara bergulir untuk peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat umum;
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang produksi, pemasaran

maupun pengembangan Sumber Daya Manusia atas dasar saling menguntungkan;

- Mengembangkan pendidikan, Jasa pelayanan sosial, Pelatihan Pengembangan, dan meningkatkan wawasan, Ketrampilan, dan kualitas sumber daya anggota maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, jika dilihat dari tujuannya BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga adalah :

- Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan Asli Desa.
- Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
- Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun dalam perjalannya BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang mengalami beberapa hambatan, yakni : (1) tidak adanya atau kurangnya modal; (2) masyarakat cenderung akan memikirkan kesejahteraan masing-masing secara prioritas; (3) Desa tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga pengelolaan terjadi pengelolaan tradisional yang mengendalikan keuntungan semata tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi akan datang; dan (4) belum terintregasinya potensi-

potensi desa dan sumber daya yang memiliki nilai jual kompetitif. Selanjutnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal pengembangan BUMDes adalah bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya; bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya; dan bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes. Di BUMDes ini juga sudah memiliki struktur organisasi, terdiri dari dewan komisaris dan pengelola BUMDes. Ada beberapa peran dari dewan komisaris, yakni : bertindak sebagai pengawas pengordinir dan penasehat operasional BUMDes; bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes; bertindak sebagai

Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat di manfaatkan BUMDes; bertindak sebagai destinator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes; bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan owner, pihak ketiga, rekanan dan kemitraan; bertindak sebagai pemberi tugas kepada masing-masing job dalam struktural organisasi BUMDes dan mengatur peyusunan rencana kerja; dan bertindak sebagai peyusun standart kerja. Selain itu, BUMDes ini juga memiliki management konsultan. Fungsi manajemen konsultan adalah sebagai penentu dari semua dari semua program kerja BUMDes yang dijalankan dalam berbagai bidang kerja, berhak memutuskan segala sesuatu yang di anggap tidak penting bagi

management perusahaan, dan melakukan proses program yang dijalankan oleh management BUMDes. Gambar 6

Permodal BUMDes terdiri dari swadaya masyarakat, APBD (Dana ADD Tahun 2010, 2011, 2012), penguatan modal dari Balai PMD Yogyakarta, dari dana APBN dan APBD (Pembangunan Infrastruktur), investasi masyarakat, dan dari dana keuntungan hasil yang telah di capai dari penghasilan bruto dan Pades dari tahun 2009-2016.

Penghasilan BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang dari tahun mengalami peningkatan, yakni :

1. Tahun 2011 BUMDes berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sebesar Rp. 8.500.000,- memberikan kontribusi PAdes sebesar Rp. 1.700.000
2. Tahun 2012 BUMDes berhasil berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sebesar Rp. 37.000.000,- memberikan kontribusi PAdes sebesar Rp. 7000.000,.
3. Tahun 2013 BUMDes berhasil berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sebesar Rp. 57.085.000,- memberikan kontribusi (PAdes) sebesar Rp. 10.800.000,-
4. Tahun 2014 BUMDes berhasil berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sampai sebesar Rp. 100.583.000,- untuk

kontribusi (PAdes) sebesar Rp. 26.573.750,- .

5. Tahun 2015 BUMDes berhasil memberikan kontribusi PAdes sebesar Rp. 55.453.375,-
6. Tahun 2016 BUMDes berhasil berhasil memberikan kontribusi PAdes sebesar Rp. 115.000.000,.
7. Untuk target tahun 2017 di harapkan dari BUMDes mendapatkan pendapatan kotor kurang lebih Rp. 1.400.000.000,- dan dapat memberikan kontribusi PAdes sebesar Rp. 470.000.000,- Grafik 2

SEJAHTERA” Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

Data di atas menunjukkan bahwa pengunjung argowisata lembah asri dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung sekitar 43.570 pengunjung yang terdiri dari wisatawan lokal maupun internasional, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan, yakni sekitar 212.000 orang. Kondisi ini jelas akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

Selain argowisata, BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang, Kecamatan Karangreja juga memiliki jenis usaha lain, yakni unit usaha jasa keuangan (permodalan dan simpan pinjam),

Perkebunan (perkebunan stroberi dan peternakan kambing, baik penggemukan dan pengembangan kambing etawa), dan fasilitas air bersih ke seluruh rumah tangga di desa serang dan bekerja sama dengan desa lain bahkan kabupaten pemalang, dengan menggunakan sambungan rumah.

### C. Penutup

Inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga adalah

1. Inovasi di bidang pelayanan Publik yaitu penghargaan, program ini membawa Kabupaten Purbalingga menjadi ranking dua Nominasi TOP 99 pada program beasiswa SMK 3 purbalingga dengan program matahari untuk kaum papa. Pemerin Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016.
2. Inovasi di bidang transportasi yaitu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan PT Angkasa Pura (AP) II akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, Kamis (14/9/2017). MoU tersebut yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara komersial, dari sebelumnya sebagai pangkalan TNI AU.
3. Inovasi dalam bidang peningkatan Perekonomian yaitu dengan mengatasi permasalahan kemiskinan dan penganggurandengan jalan

mengadakan pelatihan –pelatihan (pelatihan membuat rambut palsu, pelatihan menjahit, pelatihan membuat knalpot dan membuat bulu mata palsu),

4. Inovasi di bidang Agrowisata  
Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal pengembangan agrowisata dilakukan di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga melalui pengembangan BUMDes. BUMDes tersebut bernama “SERANG MAKMUR SEJAHTERA”. Tujuan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes ini adalah dalam rangka menumbuhkembangkan usaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada di Desa Serang, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi di sektor Pariwisata

Agar Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bisa terlaksananya maka :

- a. Harus ada komitmen dari kepala daerah dan jajarannya untuk selalu melakukan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kinerja Birokrasi di bidang pelayanan public.
- b. Melibatkan masyarakat dengan kearifan lokalnya dalam upaya inovasi untuk peningkatan perekonomian masyarakat baik dalam aspek penciptaan lapangan kerja dan usaha-usaha lainnya

## Daftar Pustaka

- Thomas R. Hutauruk. *Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur*. Politeknik Negeri Samarinda Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga*. Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
- BPS Kabupaten Purbalingga. 2016. *Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016*.
- BPS Purbalingga BUMDes. Serang *Makmur Sejahtera*. 2017.
- Buku Profil *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "SERANG MAKMUR SEJAHTERA" Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga*. BUMDes Serang Makmur Sejahtera.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., Suwondo. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(6).
- Handayani, W., Sophianingrum, M., dan Nutriandini, U. (2013). *Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota Semarang*. Riptek.
- Mardikanto, T dan Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2012). *Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan terhadap Pola Kehidupan Masyarakat Desa Serang Kecamatan Karangreja Purbalingga*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Nurchayati, dan Hikmah. (2014). *Pola Distribusi Buah Lokal dan Buah Import: Studi Kasus pada Pedagang Buah di Kota Semarang*. Seminar 33 Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014). *Research Method and Organization Studies*.
- Nursalam. (2010). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2014.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah <https://bupati.purbalinggakab.go.id/purbalingga-peringkat-dua-nominasi-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016/> diunduh pada tanggal 8 September 2017 <https://m.otonomi.co.id> diunduh pada tanggal 8 September 2017

Lampiran

Gambar 1  
Peta Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah



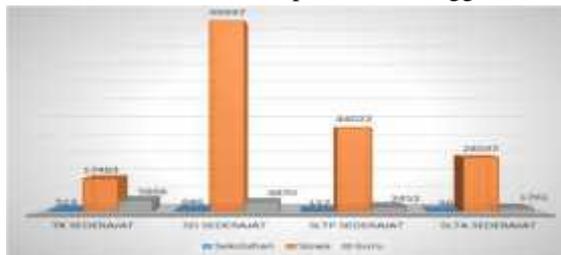
Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016

Tabel 1  
Laju Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015

WILAYAH	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Purbalingga	452.200	458.000	464.000	470.000	476.000	482.000
Distrik Banjarnegara	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
Distrik Banyuwangi	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000
Distrik Cilacap	200.000	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
Distrik Purbalingga	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000

Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016. BPS Kab. Purbalingga

Grafik 1  
Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015



Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016. BPS Kab. Purbalingga

Tabel 2. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga, 2010–2014

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line ( rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah (ribu) Total	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	210 340	209,0	24,58
2011	230 461	195,0	23,06
2012	247 508	181,3	21,19
2013	265 262	181,3	20,53
2014	275 022	176,0	19,75

Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2016. BPS Kab. Purbalingga

Gambar 2

Penerimaan penghargaan oleh Bupati Purbalingga dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016



Gambar 3

Lima kabupaten di Jawa Tengah sepakat untuk mengembangkan Lapangan Udara (Lanud) Wirasaba, Purbalingga, menjadi bandara bertaraf nasional.



Sumber : Metro News Purbalingga

Gambar 4 Pabrik Pembuatan Bulu Mata Palsu di Kab. Purbalingga



Gambar 5  
 Lokasi Argowisata Desa Serang Kabupaten Purbalingga



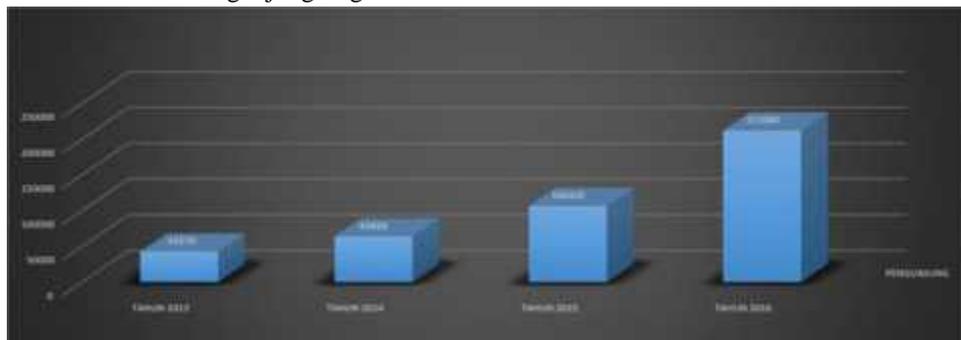
Sumber : Buku Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Gambar 6  
 Stuktur BUMDes “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang



Sumber : Buku Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “SERANG MAKMUR SEJAHTERA” Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

Grafik 2  
 Pengunjung Argowisata Lembah Asri Tahun 2013-2017



Sumber : Buku Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “SERANG MAKMUR